CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation

Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang
Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142
Email: febiuwg@gmail.com

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP OPINI AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA KAB/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2016-2018

Ridolf Rumihin[1], Nicolas Ahuluheluw[2], Theophilia F F. Leiwakabessy[3]

[1]PSDKU di Kab. Kep. Aru, Universitas Pattimura, email: rido.rumihin@gmail.com
[2]FEB, Universitas Pattimura, email: -
[3]FEB, Universitas Pattimura, email: philiafina89@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of local government characteristics on audit opinion. The characteristics of local government are proxied on local revenue (wealth), the level of local government dependence on the central government (depend), capital expenditure (expenditure), and the size of the local government (size). This research was conducted at district / city governments in Maluku province using a sample of 33 local governments. This research is expected to be used as evaluation material for district / city governments in Maluku province in regional financial management in order to get a good opinion from the BPK. Sampling in this study using a saturated sampling method. Sources of data use LKPD that have been audited for 2016-2018, and districts / cities in Maluku province in the figures for 2016-2018, the data analysis method uses logistic regression with the enter backward method. The results of this test indicate that the variable of local government characteristics that affect the audit opinion using the test above is expenditure, while the characteristic variables of the regional government that do not affect the audit opinion using the above test are wealth, expenditure, and size.

Keywords: characteristics of local government, audit opinion

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah merupakan pengelola keuangan daerah yang menjalankan segala kebijakan dari pusat maupun daerah. Masyarakat menuntut pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan agar tercipta kepercayaan masyarakat kepada derahnya. Pengelolaan keuangan yang tertib wajib dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang independen. Hal tersebut dilaksanakan agar pengelolaan keuangan berjalan dengan efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab. Pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam laporan keuangan diperiksa oleh pihak eksternal dan indpenden. Laporan keuangan negara diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mandiri dan bebas. BPK akan menyusun laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan setelah melakukan pemeriksaan. Laporan tersebut memuat opini. BPK mengeluarkan empat macam opini, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini audit BPK harus diperhatikan oleh masing-masing daerah khususnya kepala daerah. Kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan eksekutif yang dipercaya oleh para *stakeholder* untuk menjalankan pemerintahan di suatu daerah. Peran dan komitmen dari kepala daerah sangat penting dalam rangka upaya daerah dalam meraih opini audit WTP dari BPK. Variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yaitu penelitian Ristu Pratiwi dan Y Anni Aryani (2016) yang menguji karakteristik pemerintah. Karakteristik pemerintah diproksikan dengan Ukuran Pemerintah Daerah dalam bentuk total asset, kekayaan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam bentuk (DAU), dan Belanja Modal dalam bentuk Kegiatan-Kegiatan Pemerintah Daerah. Karakteristik Kepala Daerah dalam bentuk tingkat pendidikan kepala daerah, tindak lanjut temuan audit. Namun dalam penelitian ini peneliti menguji pengaruh karakteristik pemerintah terhadap opini audit yang diproksikan ke dalam bentuk pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan, total asset, dan belanja modal. Dalam penelitian ini peneliti mengurangi dua variabel independen dari peneliti terdahulu yaitu karakteristik kepala daerah dan tindak lanjut temuan audit. Peneliti megurangi variabel kepala daerah karena menurut peneliti variabel tersebut tidak memenuhi kriteria pemilihan sampel. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya dimana peneliti sebelumnya menggunakan sampel LKPD dan Opini pemerintah daerah seluruh Indonesia sedangkan peneliti hanya menggunakan LKPD dan Opini pemerintah daerah Kab/Kota di Proivnsi Maluku.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini : 1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Opini Audit?, 2) Apakah Tingkat ketergantungan Terhadap Pemerintah Pusat berpengaruh terhadap Opini Audit?, 3) Apakah Belanja Modal Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Opini Audit?, 4) Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Opini Audit?.

Tujuan Penelitian adalah menguji secara empiris: 1)pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap opini audit 2) pengaruh tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat terhadap opini audit, 3) pengaruh belanja modal terhadap opini audit, 4) pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap opini audit.

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan.

Teori Keagenan menjelaskan bahwa pemerintah merupakan agen bagi masyarakat (prinsipal) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Pemerintah adalah sebuah organisasi yang besar dan komplek, sebagai sebuah organisasi yang besar maka pemerintah harus dikelola dengan baik. Pengelolaan organisasi pemerintah sebagaimana organisasi sektor swasta dikelola oleh sekelompok orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola organisasi. Pada sektor swasta para *stakeholder* yang disebut *principal* dan orang yang diberi kuasa disebut *agent*. Teori tersebut dikenal dengan *agency theory*. Penelitian Jensen dan Meckling (1976) dan Ross (1973) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan kontrak yang melibatkan satu atau lebih *principal* dengan *agent* untuk melaksanakan pekerjaan yang melibatkan sebagian pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pelimpahan sebagian wewenang dari *principal* kepada *agent* akan mengakibatkan *agent* tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan dari *principal* karena *agent* mempunyai kepentingan sendiri.

Opini Audit

BPK merupakan lembaga pemeriksa keuangan negara yang diamanahkan dalam UUD 1945.Tujuan dilaksanakannya pemeriksaan atas laporan keuangan salah satunya untuk memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini yang dimuat ada empat macam opini yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Opini Tidak memberikan pendapat (TMP). Ada beberapa kriteria yang mempengaruhi BPK dalam memberikan opini pada laporan keuangan. Kriteria tersebut antara lain adalah evaluasi atas keefektifan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karakteristik Pemerintah

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2006), karakteristik adalah ciri- ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Sumarjo (2010) mendefinisikan karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset, kemakmuran (*wealth*) yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ukuran legislatif, tingkat *leverage* yang diproksikan dengan total utang dibagi total

ekuitas, dan *intergovernmental revenue* yang diproksikan dengan perbandingan antara jumlah total dana perimbangan dengan jumlah total pendapatan. Hilmi (2010) menggunakan lebih sedikit proksi untuk menjelaskan karakteristik pemerintah yaitu kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, dan total aset. Penelitian Lesmana (2010) menerangkan karakteristik daerah melalui beberapa variabel, yaitu ukuran pemda yang dihitung dari total aset dalam neraca, total kewajiban, pendapatan transfer yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran, umur pemda, jumlah SKPD, dan kemandirian keuangan daerah yang dihitung dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi jumlah transfer dan pendapatan. Yulianingtyas (2011) juga melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan dengan mendefinisikan karakteristik daerah dengan lebih sedikit variabel yaitu ukuran daerah (*size*), jumlah SKPD, dan status daerah dimana lokasi pemda dan jumlah anggota DPRD dijadikan variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan model karakteristik pemerintah daerah Ristu Pratiwi dan Y Anni Aryani (2016), yaitu kekayaan daerah, tingkat ketergantungan (*intergovernmental revenue*), belanja pemerintah dan total aset. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan total PAD untuk menggambarkan kekayaan daerah. Dalam penelitian ini peneliti mengurangi 2 variabel yakni Tindak Lanjut Temuan Audit dan Kepala Daerah.

Pengembangan Hipotesis

Kekayaan pemerintah daerah dapat diukur dari pendapatan perkapita penduduk suatu daerah dan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah dengan kekayaan yang besar mampu melakukan pelayanan publik yang optimal. Jumlah kekayaan yang besar mencerminkan pemerintah daerah mampu menggali potensi-potensi kekayaan daerah. Pengelolaan potensi-potensi daerah yang baik akan mendukung kinerja pemerintah daerah. Kekayaan pemerintah daerah mempunyai pengaruh positif pada pengungkapan LKPD (Laswad dkk., 2005; Setyaningrum dan Syafitri, 2012), dan kinerja pemerintah daerah (Mustikarini dan Fitriasari, 2012). Namun, menurut Johnson dkk. (2012), semakin besar pendapatan mencerminkan lingkup kegiatan yang luas sehingga membutuhkan koordinasi dan kontrol yang tinggi. Menurut Zaelani (2010 dalam Nuraeni dan Martani, 2012) menyatakan bahwa pendapatan yang besar mencerminkan kegiatan yang semakin komplek, sehingga sistem pengendalian intern akan semakin lemah. Sistem pengendalian intern merupakan salah satu dasar pemberian opini audit BPK. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis pertama sebagai berikut ini.

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap opini audit.

Pemerintah Daerah masih mempunyai ketergantungan pada pemerintah pusat salah satunya berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Tujuan diberikan DAU adalah untuk sistem pemerataan. Daerah dengan kemampuan fiskal kecil dan kebutuhannya besar akan mendapat DAU besar (Nordiawan dan Hertianti, 2010: 26). Tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat akan cenderung membuat pemerintah daerah lebih menaati peraturan yang berlaku. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh pada positif pada kinerja

pemerintah daerah (Susbiyani dkk., 2014; Mustikarini dan Fitriasari, 2012). Tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh positif pada pengungkapan laporan keuangan (Ingram 1984 dalam Martani dan Lestiani 2012; Robin dan Austin 1986). Pada penelitian Nuraeini dan Martani (2012) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh pada opini yang diberikan oleh BPK. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang semakin besar sewajarnya membuat pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, sehingga LKPD tersaji sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian diatas maka dikembangkan hipotesis kedua sebagai berikut ini.

H2: Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh terhadap opini audit.

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dituangkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Kegiatan- kegiatan pemerintah daerah menggunakan anggaran belanja agar *outcome* kegiatan dapat tercapai. Jumlah belanja yang besar pada pemerintah daerah mengindikasikan kegiatan yang dilakukan juga besar dan kompleks. Sistem pengendalian terhadap belanja harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar *outcome* dapat tercapai. Namun, jika pemerintah daerah tidak berhati-hati dalam penatausahaan pengelolaan belanja maka akan terjadi banyak penyimpangan. Pada saat ini belanja pemerintah daerah masih ditemukan banyak penyimpangan. Menurut Behn dkk. (2010), belanja berpengaruh positif pada tingkat pengungkapan laporan keuangan organisasi nirlaba. Belanja pemerintah terbukti berpengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah (Marfiana dan Kurniasih, 2013), namun hal ini bertentangan dengan penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012). Menurut Nurdiono (2014) besarnya anggaran belanja publik berdampak negatif pada opini BPK. Namun, penelitian Safitri (2012) menemukan bahwa realisasi anggaran tidak berpengaruh pada opini audit BPK. Pemerintah daerah dengan realisasi anggaran belanja yang besar pada umumnya mempunyai kompleksitas kegiatan yang besar pula. Anggaran belanja yang besar pada umumnya terdiri dari kegiatan yang banyak oleh karena itu dibutuhkan pengendalian yang memadai. Belanja pemerintah daerah yang besar jika tidak dikelola dengan hati-hati akan menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akan mempengaruhi auditor dalam memberikan opini. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis ketiga adalah sebagai berikut ini.

H3: Belanja Modal berpengaruh terhadap opini audit.

Ukuran Pemerintah Daerah. Ukuran suatu organisasi dapat diukur dengan total aset, jumlah karyawan, dan total pendapatan. Pada sektor publik ukuran pemerintah daerah dapat diukur dari total aset, jumlah penduduk, jumlah SKPD, dan jumlah legislatif. Pengelolaan organisasi membutuhkan sumber daya yang cukup dalam mencapai tujuan organisasi. Ukuran sebuah organisasi yang di

audit dan kesehatan keuangan klien mempunyai pengaruh negatif pada kualitas audit (DeAngelo, 1981; Deis dan Giroux, 1992; Habib, 2013; Setyaningrum,2012). Pada perusahaan besar cenderung menyajikan laporan keuangan yang jauh dari salah saji. Menurut Damanpour dan Schneider (2008), organisasi yang besar mempunyai sumber daya ekonomi yang lebih baik dalam mengadopsi inovasi.. Penelitian Zaelani (2010, dalam Nuraeni dan Martani, 2012) menyatakan bahwa ukuran organisasi yang besar mempunyai sistem pengendalian yang kuat. Jika sistem pengendalian kuat maka laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Penelitian Nuraeni dan Martani (2012) tidak berhasil membuktikan hal tersebut, penelitian ini menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berhubungan negatif dengan opini audit BPK semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar kemungkinan untuk memperoleh opini yang buruk dari BPK. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah kurang bisa mengelola jumlah aset yang besar. Berdasarkan penelitian di atas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini mengacu pada penelitian (DeAngelo, 1981; Deis dan Giroux, 1992; Setyaningrum,2012; abib 2013; Zaelani 2010 dalam Nuraeni dan Martani, 2012) maka hipotesis adalah sebagai berikut.

H4: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap opini audit.

Gambar 1. Model Penelitian

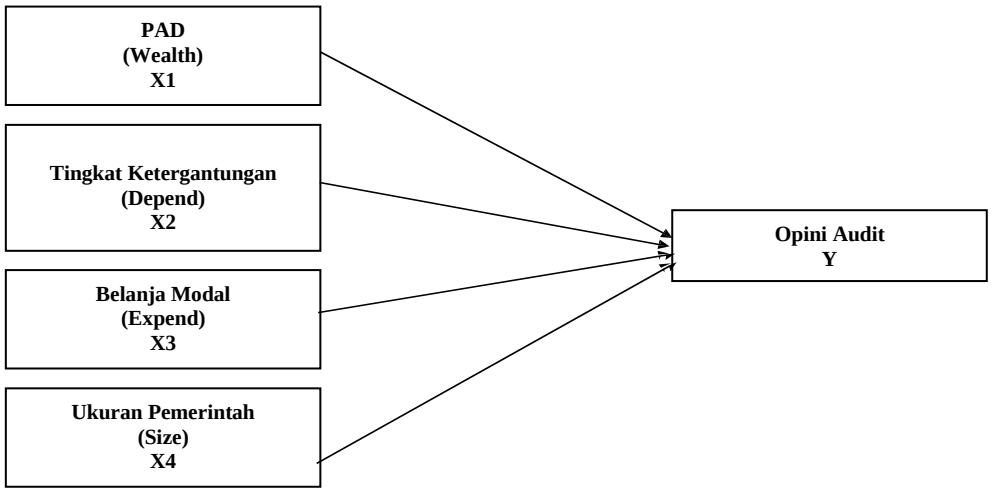

METODE PENELITIAN

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Objek dalam penelitian ini adalah karakteristik pemerintah daerah yang diproporsikan pada pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Menurut Buletin Teknis SPKN Nomor 01, opini audit terdiri dari WTP dan atau WTP DPP, WDP, TW, dan TMP. Ukuran variabel dependen pada model pertama adalah WTP dan WTP-DPP = 1 dan opini WDP, TW, TMP = 0. Ukuran variabel pada model kedua adalah opini WTP dan WTP DPP =4; WDP=3; TW=2; TMP=1.

Pendapatan Asli Daerah menggambarkan tingkat kekayaan daerah. Tingkat kekayaan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012); Marfiana dan Kuniasih (2013); dan Sumardjo (2010) yang menggunakan realisasi PAD dalam satuan moneter.

Menurut Ardhani (2011) dalam Sudarsana (2013), Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer yang sifatnya umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sebagai upaya mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Menurut Mustikarini dan Fitriasari (2012) dan Marfiana dan Kurniasih (2013) realisasi total belanja terdiri dari belanja pegawai, barang jasa, dan modal yang diukur dalam satuan moneter.

Ukuran Pemerintah Daerah dapat dinilai melalui total aset yang dimiliki, dan lain-lain. Peneliatian ini mengunakan total asset dalam satuan moneter (Setyaningrum, 2012; Nuraeni dan Martani, 2012; Suharjanto dan Yuliningtyas, 2011) yang tercantum dalam neraca LKPD tahun 2016-2018 audited.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Menurut Sugiyono, (2017:124) sampling jenuh adalah teknik pengumpulan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah Opini Audit Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang diaudit oleh BPK tahun 2016-2018 serta tercantum dalam IHPS yang dikeluarkan oleh BPK di website BPK https://maluku.bpk.go.id/hp-lkpd/; dan kab/kota dalam angka di provinsi Maluku di website BPS, maluku.bps.go.id.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitin ini menggunakan analisi statistik deskriptif dan analisis regresi logistik.

Analisa Statistik Deskriptif

Analisis statistik dekriptif memberikan gambaran umum mengenai data dan penyebaran data yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Logistik

Analisis regresi logistik digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel respon yang berupa data dikotomik/biner dengan variabel bebas yang berupa data berskala interval dan atau kategorik (Hosmer dan Lemeshow, 1989).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari website bpk.go.id, dan data bps.go.id yakni Kab/Kota dalam angka di Provinsi Maluku. Sampel yang didapat sejumlah 33 buah dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 1. Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	LKPD Audited Tahun 2016-2018	33
2	Data LKPD yang tidak ada dalam sumber data	0
3	peneliti	33
	Jumlah Sampel	

Pengujian Hipotesis Penelitian

Karena variabel dependen bersifat dikotomi (Opini WTP dan Non WTP), maka pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi logistik. Tahapan dalam pengujian dengan menggunakan uji regresi logistik dapat dijelaskan sebagai berikut (Ghozali, 2005):

Uji *(Overall Model Fit)*

Uji *overall Model Fit* atau uji keseluruhan model ini adalah untuk menguji variabel independen di dalam regresi logistik secara serentak atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Uji *overall model fit* ini dihitung dari perbedaan nilai -2LL antara model dengan hanya terdiri dari konstanta dan model yang diestimasi terdiri dari konstanta dan variabel independen Uji -2LL mengikuti distribusi *chi square* dengan derajat kebebasan *(degree of freedom)* akan ditampilkan pada tabel.

Uji Stepwise (Conditional) likelihood ratio)

Pengujian ini dilakukan saat variabel bebas (wealth, depend, expend, dan size) dimasukkan ke dalam model dengan metode backward stepwise yaitu dimulai dengan memasukkan semua variabel independen yang menunjukkan kemaknaan statistik pada analisis univariabel, lalu dicoba mengeliminasi 1 variabel independen yang pada uji Wald memiliki nilai p terbesar dan tak bermakna secara statistik. Kemudia melakukan kembali analisis multivariabel setelah mengeliminasi 1 variabel ini. Proses percobaan eliminasi ini berlanjut sampai yang tersisa seluruhnya adalah variabel independen yang bermakna secara statistik.

Uji Koefisien Determinasi

Cox dan Snell's R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R^2 pada multiple regression yang didasarkan pada Teknik estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari satu sehingga sulit diinterpretasikan. Negelkerke R Square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell's untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai nilai Cox dan Snell's R Square dengan nilai

maksimumnya. Nilai Negelkerke R Square dapat diiterpretasikan seperti nilai R2 pada multiple regression.

Uji Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* menguji data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan *fit*). Jika nilai statistic *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* sama dengan atau kurang dari 0,05, maka ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *Goodness fit model* tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* lebih besar dari 0,05, maka model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya (Ghozali, 2009: 80).

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah/ PAD (Wealth) Terhadap Opini Audit

Berdasarkan hasil uji regresi logistik bahwa pengaruh karakteristik pemerintah yang diproporsikan dengan pendapatan asli daerah terhadap opini audit pada pengujian step 1 dengan nilai signifikansi 0.371 dengan nilai wald hitung 0.799 < chi square table DF1 yaitu 3,841, step 2 dengan nilai signifikansi 0.252 dengan nilai wald hitung 1.311 < chi square table DF1 yaitu 3,841, dan step 3 dengan nilai signifikansi 0.427 dengan nilai wald hitung 3.817 < chi square table DF1 yaitu 3,841, maka H1 ditolak artinya wealth tidak berpengaruh terhadap opini audit.

Pendapatan asli daerah yang besar mencerminkan bahwa pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan dan mengungkapkan PAD oleh para stakeholder khususnya penyumbang pendapatan. Selain itu, pemerintah daerah dapat memperkecil potensi-potensi kehilangan pendapatan yang menyebabkan kerugian negara.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan (Depend) Terhadap Opini Audit

Berdasarkan hasil uji regresi logistik bahwa pengaruh tingkat ketergantungan yang diproporsikan dengan Dana Transfer terhadap opini audit pada pengujian step 1 dengan nilai signifikansi 0.434 dengan nilai wald hitung 0.613 < chi square table DF1 yaitu 3,841, maka H2 ditolak artinya depend tidak berpengaruh terhadap opini audit.

Penelitian ini mendukung penelitian Nuraeini dan Martani (2012) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh pada opini yang diberikan oleh BPK. Hal ini menunjukkan bahwa pemeintah daerah telah mantaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengawasan pemerintah pusat terhadap dana-dana yang diberikan kepada pemerintah daerah telah dimonitoring dan dievaluasi dengan baik.

Pengaruh Belanja Modal (Expend) Terhadap Opini Audit

Berdasarkan hasil uji regresi logistik bahwa pengaruh Belanja Modal yang diproporsikan dengan Program dan Kegiatan pada pengujian step 1 dengan nilai signifikansi 0.105 dengan nilai wald hitung 2.626 < chi square table DF1 yaitu 3,841, step 2 dengan nilai signifikansi 0.083 dengan nilai wald hitung 2.997 < chi square table DF1 yaitu 3,841, dan step 3 dengan nilai signifikansi 0.122 dengan nilai wald hitung 2.391 < chi square table DF1 yaitu 3,841, maka H3 step 1-3 ditolak artinya expend tidak berpengaruh terhadap opini audit.

Penelitian ini mendukung penelitian (Puspita dan Martani, 2012) yang menyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Belanja modal merupakan implikasi dari setiap progran dan kegiatan pemerintah daerah yang nantinya dirasakan oleh masyarakat, sistim pengendalian internal pengelolaan belanja yang optimal maka tidak akan terjadi penyimpangan belanja dan memiliki opini audit yang baik.

Berdasarkan hasil uji regresi logistik bahwa pengaruh Belanja Modal yang diproporsikan dengan Program dan Kegiatan pada pengujian step 4 dengan nilai signifikansi 0.019 dengan nilai wald hitung 5.547 > chi square table DF1 yaitu 3,841, maka H3 step 4 diterima artinya expend berpengaruh terhadap opini audit.

Penelitian ini mendukung penelitian Behn dkk.(2010), yakni belanja modal berpengaruh positif pada tingkat pengungkapan laporan keuangan organisasi nirlaba. Belanja daerah sangat rawan dalam pengelolaanya, dimana banyak celah yang digunakan untuk melakukan korupsi karena anggaran belanja digunakan untuk peningkatan kualitas masyarakat. Semakin besar belanja daerah, maka semakin kompleks dan sulit untuk mempertanggungjawabkan dengan baik, sehingga rawan penyimpangan yang berakibat penurunan opini audit.

Pengaruh Ukuran Pemerintah (Size) Terhadap Opini Audit

Berdasarkan hasil uji regresi logistik bahwa pengaruh Ukuran Pemerintah yang diproporsikan dengan aset pada pengujian step 1 dengan nilai signifikansi 0.343 dengan nilai wald hitung 0.898< chi square table DF1 yaitu 3,841, step 2 dengan nilai signifikansi 0.270 dengan nilai wald hitung 1.217 < chi square table DF1 yaitu 3,841, maka H4 ditolak artinya size tidak berpengaruh terhadap opini audit.

Penelitian ini mendukung penelitian DeAngelo (1981); Deis dan Giroux (1992); Setyaningrum (2012) bahwa pemerintah daerah yang mempunyai aset besar akan menyajikan laporan keuangan yang jauh dari salah saji. Aset yang besar merupakan sumber daya yang baik dalam menjalankan organsasi. Menurut Doyle dkk. (2005); Petrovits dkk. (2011); dan Zaelani (2010), Nuraeni dan Martani 2012) menyatakan bahwa organisasi dengan aset yang besar mempunyai sistem pengendalian intern yang kuat. Sistem pengendalian intern yang kuat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan reliabel sehingga opini audit akan menjadi lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian variabel independen karakteristik pemerintah yang diproksikan pada pendapatan asli daerah (*wealth)* pada penelitian ini maka disimpulkan bahwa H1 ditolak yang artinya pendapatan asli daerah (*wealth)* tidak berpengaruh terhadap opini audit;
2. Berdasarkan hasil pengujian variabel independen karakteristik pemerintah yang diproksikan pada tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (*depend)* pada penelitian ini maka disimpulkan bahwa H2 ditolak yang artinya tingkat ketergantungan (*depend)* tidak berpengaruh terhadap opini audit;
3. Berdasarkan hasil pengujian variabel independen karakteristik pemerintah yang diproksikan pada belanja modal (*expend)* pada penelitian ini maka disimpulkan bahwa H3 diterima yang artinya belanja modal (*expend*) berpengaruh terhadap opini audit;
4. Berdasarkan hasil pengujian variabel independen karakteristik pemerintah yang diproksikan pada ukuran pemerintah daerah (*size)* pada penelitian ini maka disimpulkan bahwa H4 ditolak yang artinya ukuran pemerintah (*size*) tidak berpengaruh terhadap opini audit.

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi setiap pemerintah darah kabupaten/kota yang ada diprovinsi maluku untuk lebih berahti-hati dalam pengelolaan keuangan daerah yang berdampak pada opini yang diberikan oleh BPK, sehinggan opini yang diberikan oleh BPK adalah opini yang baik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada LKPD yang telah diaudit tahun 2016-2018 saja dan sumber data LKPD tahun 2016-2018 yang dimiliki peneliti tidak lengkap.

Berdasarkan keterbatasan di atas maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah mencari sumber data yang lebih banyak lagi dan memperluas wilayah penelitian. Selain itu untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap opini audit sebaiknya menambah variabel pada karakteristik pemerintah daerah. Serta menambahkan variabel lain yang bisa menjadi faktor-faktor yang kemungkinan berpengaruh terhadap pemberian opini audit.

REFERENSI

Abdullah, Hilmi. 2010. Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.

Adelia, Pramita Sari, Dwi Martani, dan Dyah Setyaningrum. 2015. Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Admin, 2019. Pemkab Aru dapat Opini Disclaimer dari BPK, https://www.malukuterkini.com/2019/08/02/pemkab-aru-dapat-opini-disclaimer-dari-bpk/, diakses pada 02 agustus 2019 pukul 18:54 pm.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Maluku. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2020. Tahun 206-2018. https://maluku.bpk.go.id/hp-lkpd/.

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dalam angka. Tahun 2016-2018. http://maluku.bps.go.id.

Kamus Umum Bahasa Indonesia. 2006. karakteristik adalah ciri- ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain.

Khasanah, Nur Laitul. 2014. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Lesmana, Sigit Indra. 2010. Pengaruh karakteristik daerah, jumlah penduduk, temuan audit, dan opini audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Marfiana, Nandhya, Kurniasih Lulus. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Mustikarini, Widya Astuti dan Debby Fitriasari. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV : Banjarmasin.

Nurdiono. 2014. Analisis hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Disertasitidak diterbitkan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Pratiwi, Ristu. dan Aryani, Y.Anni. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008) Kamus Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional.

Riadi, Muchlisin. 2013. Pengertian dan Jenis-Jenis Opini Audit https://www.kajianpustaka.com/2013/10/pengertian-dan-jenis-jenis-opini-audit.html, diakses pada 07 oktober 2013.

Sudarsana, Hafidh Susila. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia.

Sumarjo. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Syafitri, Febriyani. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Zimmerman. 1977. The Munipicial Accounting Maze: An Analysis Political Incentives.